

ELASTISITAS PERMINTAAN

Elastisitas Permintaan Elpiji Subsidi (3Kg) Terhadap Kenaikan Harga Elpiji Non-Subsidi (12Kg)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Makalah Mikroekonomi Untuk Kebijakan Publik 2



Oleh

Sofia Anggita Hasty

NPM 1406587891

Fakultas Ekonomi, Magister Perencanaan Kebijakan Publik XXXI,

Universitas Indonesia

2014

ELASTISITAS PERMINTAAN

ELASTISITAS PERMINTAAN ELPIJI SUBSIDI (3KG) TERHADAP KENAIKAN HARGA ELPIJI NON-SUBSIDI (12KG)

Sofia Anggita Hasty

NPM 1406587891

Fakultas Ekonomi, Magister Perencanaan Kebijakan Publik XXXI, Universitas Indonesia

The purpose of this paper is to analyze the relationship between the increasing price of non-subsidize Elpiji and the quantity demand of subsidize Elpiji. Supports the result of previous study conducted by Institutes for Economics and Social Research, there is a positive cross elasticity from the rising price of non-subsidize Elpiji to the subsidized Elpiji quantity of demand, this paper gives the descriptive explanation and data related to the previous finding. The high quantity import of LPG has prompted Pertamina to gradually increase the price of non-subsidize LPG by forming the roadmap until 2016, and it may leads to the greater price disparity between the non-subsidized and subsidized Elpiji. The possibility drawbacks are : miss-targeting subsidy policy and illegal acts of 'pengoplosan' which in turn cause the higher government expenditure. In the long run, the positive cross elasticity of non-subsidized price Elpiji and subsidized quantity of demand gives a challenge for Indonesia to intensify domestic production of LPG in order to decrease the LPG import dependency, and to maintain the price disparity.

Latar Belakang

Di penghujung tahun 2014, Indonesia mengalami dua kenaikan harga produk migas yang menjadi andalan masyarakat sebagai bahan bakar, yaitu kenaikan harga BBM dan kenaikan harga Elpiji 12Kg. Pentingnya peran migas menjadi alasan mengapa kebijakan-kebijakan pada sektor migas selalu menarik perhatian dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berdasarkan data, sektor migas menyumbang 29,8 persen¹ dari keseluruhan penerimaan negara tahun 2013. Sama halnya dengan subsidi BBM yang dinilai tidak tepat sasaran karena pengguna BBM sebagian besar merupakan kelas menengah keatas, subsidi gas Elpiji 3Kg juga memicu penyalahgunaan subsidi dan tidak tepat sasaran karena adanya kenaikan harga Elpiji 12Kg yang membuat disparitas harga Elpiji non subsidi dan subsidi menjadi semakin besar.

Sekilas mengingat tentang kebijakan 'Konversi Minyak Tanah ke Gas' yang pertama kali disahkan oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada tahun 2007 lalu melalui Peraturan Presiden No.

1 Sumber: Bank Indonesia, terdapat dalam lampiran.

104 Tahun 2007. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), atau di Indonesia lebih dikenal dengan merk “ELPIJI” yang diproduksi oleh PT. Pertamina, adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam dan digunakan sebagai bahan bakar (Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara 2009). Sebelum adanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, PT.Pertamina hanya memproduksi Gas Elpiji ukuran 20Kg untuk target konsumen rumah tangga kelas menengah ke atas, dan Gas Elpiji 50Kg untuk target konsumen restoran dan industri. Namun setelah adanya kebijakan tersebut, pemerintah melalui PT.Pertamina memproduksi gas ukuran 3Kg berwarna hijau untuk menyasar konsumen rumah tangga ekonomi kelas bawah, yang juga merupakan produk subsidi dari pemerintah.

Kenaikan harga Elpiji 12Kg non subsidi pada 8 September 2014 oleh PT.Pertamina setelah mendapat persetujuan dari pemerintah, adalah sebesar Rp 9.519/Kg, atau setara Rp 114.300/tabung dari sebelumnya Rp 7.731/Kg atau Rp 92.800/tabung. Kenaikan harga Elpiji 12Kg ini menurut PT.Pertamina masih dibawah harga keekonomiannya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata CP Aramco y-o-y Juni 2014, seharusnya harga keekonomian Elpiji 12Kg saat ini Rp 15.110/Kg atau Rp 181.400/tabung (PT. Pertamina, 2014). Atas dasar inilah PT.Pertamina telah menyusun Roadmap Penyesuaian Harga Elpiji 12Kg secara berkala yang dilakukan setiap 6 bulan sekali mulai September 2014 hingga mencapai harga keekonomiannya di tahun 2016.

Dengan adanya *roadmap* kenaikan harga yang disusun PT.Pertamina, maka disparitas harga Elpiji non subsidi dan subsidi akan semakin besar dan makin besar juga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan subsidi gas Elpiji. Tulisan ini akan memberikan analisa deskriptif konsumsi gas Elpiji 3Kg pada selain rumah tangga ekonomi kelas bawah.

Landasan Teori

1. Teori Permintaan dan Penawaran

Pasar dalam teori ekonomi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga tercipta jumlah barang pada tingkat harga tertentu.

a. Permintaan

Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang rela dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu (Pyndick & Rubinfeld 2008). Semakin tinggi harga maka semakin rendah jumlah barang yang diminta konsumen sehingga hubungan harga dengan jumlah permintaan adalah negatif.

$$Q_D = Q_D(P)$$

Selain harga barang itu sendiri, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah (Rahardja & Manurung 2006): pendapatan, harga barang yang terkait (substitusi dan komplementer), tingkat pendapatan per kapita, jumlah penduduk, selera konsumen, perkiraan harga di masa mendatang, dan distribusi pendapatan.

Di dalam tulisan ini, teori permintaan yang akan dibahas adalah bagaimana harga barang lain berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Dalam hal ini adalah pengaruh harga Elpiji 12Kg terhadap permintaan Elpiji 3Kg. Harga barang lain dapat berpengaruh terhadap permintaan suatu barang apabila keduanya memiliki keterkaitan (Rahardja dan Manurung, 2006). Keterkaitan kedua barang tersebut dapat bersifat substitusi (pengganti) atau komplementer (pelengkap). Jika kedua barang tersebut bersifat komplementer, maka hubungan harga barang Y terhadap permintaan barang X adalah negatif. Jika kedua barang tersebut bersifat substitusi, maka hubungan harga barang Y terhadap permintaan barang X adalah positif.

Dalam kaitannya dengan kasus dalam tulisan ini, gas Elpiji 3Kg (subsidi) adalah substitusi dari gas Elpiji 12Kg (non-subsidi). Ketika terjadi kenaikan harga pada gas Elpiji 12Kg, akan meningkatkan permintaan terhadap gas Elpiji 3Kg.

b. Penawaran

Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang rela ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu, semakin tinggi harga maka semakin banyak jumlah barang yang rela ditawarkan sehingga hubungan antara harga dengan jumlah penawaran adalah positif.

$$Q_s = Q_s(P)$$

Jumlah penawaran tidak hanya ditentukan oleh tingkat harga, tapi juga ditentukan oleh biaya produksi meliputi upah, tingkat bunga, dan biaya bahan baku (Pyndick & Rubinfeld 2008)

2. Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan adalah persentase perubahan pada kuantitas permintaan akibat kenaikan satu persen dari harga (Pyndick & Rubinfeld 2008, p.33). Terdapat beberapa elastisitas permintaan: elastisitas harga, elastisitas silang dan elastisitas pendapatan (Rahardja dan Manurung 2006). Teori elastisitas yang akan dibahas pada tulisan ini adalah elastisitas silang. Elastisitas silang mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar satu persen (Pyndick & Rubinfeld 2008).

Dalam kasus ini, elastisitas silang adalah antara harga Elpiji 12Kg dengan permintaan Elpiji 3Kg. Apabila di masukkan ke dalam rumus elastisitas silang sebagai berikut:

$$E_{elpiji\ 3\ kg} = \frac{\Delta Q_{elpiji\ 3\ Kg} / Q_{elpiji\ 3\ Kg}}{\Delta P_{elpiji\ 12\ Kg} / P_{elpiji\ 12\ Kg}} = \frac{P_{elpiji\ 12\ Kg} * \Delta Q_{elpiji\ 3\ Kg}}{Q_{elpiji\ 3\ Kg} * \Delta P_{elpiji\ 12\ Kg}}$$

Jika kedua barang memiliki sifat substitusi (pengganti), maka elastisitasnya akan positif . Sebaliknya, apabila kedua barang memiliki sifat komplementer (pelengkap), maka elastisitasnya akan negatif.

3. Intervensi Pemerintah dalam Pasar

Di dalam perekonomian, pemerintah dapat mengintervensi keseimbangan harga yang tercipta di pasar secara langsung maupun tidak langsung. Instrumen yang secara langsung dapat mengintervensi harga adalah dengan menetapkan *ceiling* atau *floor price*, sedangkan instrument kebijakan yang secara tidak langsung adalah pemberian subsidi atau pajak. Dalam kasus Elpiji, pemerintah mengeluarkan produk ber-subsidi, yaitu gas Elpiji 3Kg. Dengan adanya gas Elpiji 3Kg yang di subsidi, maka terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan dengan produk yang tidak disubsidi, yaitu gas Elpiji 12Kg dan 50Kg. Di bawah ini terdapat tabel perkembangan harga gas Elpiji (3Kg, 12Kg, dan 50Kg) dari tahun 2005-2014.

Tabel 1
Harga Eceran Gas Elpiji 3Kg, 12Kg dan 50Kg dari tahun 2005-2014 (per-Kg)

Tahun	Bulan	Harga Gas Elpiji per-Kg		
		3Kg	12Kg	50Kg
2005	Januari		4,250.0	4,250.0
2006	Januari		4,250.0	4,250.0
2007	Januari	4,250.0	4,250.0	6,259.0
2008	Januari	4,250.0	4,250.0	7,932.0
2009	Januari	4,250.0	5,750.0	7,255.0
2010	Januari	4,250.0	5,850.0	7,355.0
2011	Januari	4,250.0	5,850.0	7,355.0
2012	Januari	4,250.0	5,850.0	8,355.0
2013	Januari	4,250.0	5,850.0	13,080.0
2014	Januari	4,250.0	7,541.7	16,070.0
	September	4,250.0	9,325.0	14,980.0

Sumber: Data CEIC

Pada September 2014, terjadi kenaikan harga pada gas Elpiji non-subsidi 12Kg, dari sebelumnya yaitu Rp 7.514,- per-Kg menjadi Rp. 9325,- per-Kg. Sedangkan untuk gas-subsidi tidak mengalami kenaikan harga sejak tahun 2007 sampai 2014, yaitu Rp. 4.250,- per-Kg. Meskipun seharusnya pemerintah tidak ikut dalam penentuan harga gas Elpiji Non-Subsidi, namun karena Elpiji memiliki peran yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, penentuan harga Elpiji non-subsidi masih di bawah harga keekonomiannya dan pemerintah turut mempertimbangkan mengenai perubahan harga yang terjadi.

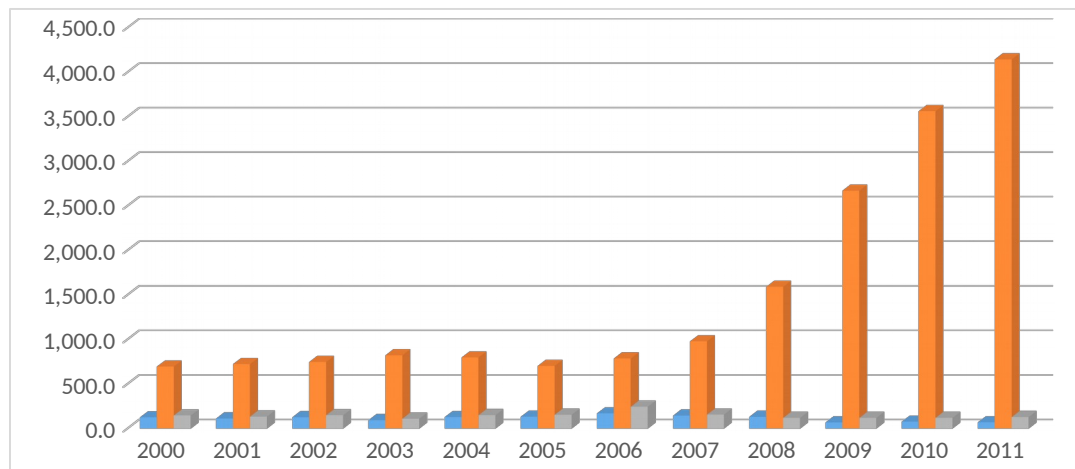
Analisis Deskriptif Elastisitas Permintaan Elpiji 3Kg Akibat Kenaikan Harga Elpiji 12Kg



Gambar 1
Kerangka Analisa Kebijakan Subsidi Elpiji

LPG mulai diperkenalkan di pasar energi tahun 1968, dan sejak saat itu menjadi salah satu yang paling berperan dalam sumber energi di dalam perekonomian. Pada tahun 1990, persentase penggunaan LPG dari total konsumsi energi berkisar 1,2 persen tapi pada 2011 mencapai hingga 5 persen (Sambodo 2014). Kenaikan konsumsi LPG sebagai sumber energi merepresentasikan peranan LPG yang semakin tinggi di masyarakat. Berdasarkan data dari *Handbook of Energy and Economic Statistic* 2012, konsumsi LPG didominasi oleh sektor rumah tangga. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan konsumsi LPG dari tahun 2000 sampai 2011. Dapat dilihat bahwa sektor rumah tangga selalu mendominasi dalam konsumsi LPG dengan tren meningkat. Terutama pada tahun 2008 yang mengalami kenaikan konsumsi sebesar 62,6 persen. Kenaikan yang sangat signifikan dipicu oleh kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang menghasilkan produk gas bersubsidi. Sedangkan untuk sektor lainnya, jumlah konsumsi cukup berfluktuatif. Tapi karena konsumsi LPG untuk sektor lainnya

sangat rendah terutama jika dibandingkan dengan konsumsi oleh rumah tangga, maka kebijakan terkait Elpiji diperkirakan paling besar dirasakan oleh sektor rumah tangga.



Sumber: Handbook of Energy & Economic Statistic 2012, Kementerian ESDM

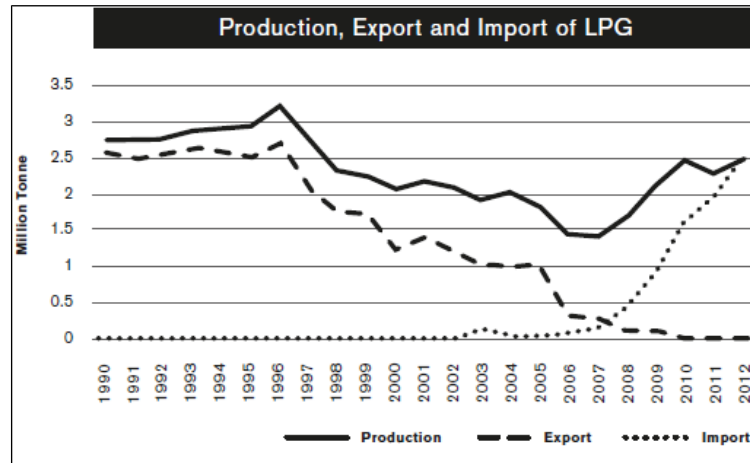
Gambar 2
Konsumsi LPG Berdasarkan Sektor pada 2000-2011 (dalam ribu ton)

Permintaan LPG yang semakin meningkat dari sektor rumah tangga tidak diimbangi dengan bahan baku yang melimpah, sehingga untuk memenuhi permintaan pasar dilakukan impor. Indonesia kaya dengan minyak dan gas bumi, namun terjadi kesalahpahaman mengenai bahan baku Elpiji. Gas bumi/gas alam adalah jenis gas yang diperoleh dari sumur minyak yang sangat banyak di Indonesia, dan diolah dalam bentuk LNG (*Liquified Natural Gas*), CNG (*Compressed Natural Gas*) dan Gas pipa. Kandungannya yang miskin *propane* dan *butane* membuatnya sulit diolah menjadi Elpiji. Sehingga gas alam ini sebagian besar di ekspor dengan harga yang jauh dibawah harga Elpiji (LPG). Sedangkan LPG mengandung unsur *propane* dan *butane* serta *pentane*. Realitanya adalah Indonesia mengimpor 3,3 juta ton LPG di tahun 2013 dan akan selalu meningkat tiap tahun sesuai naiknya kebutuhan masyarakat (Lumbanraja S 2014).

Ketergantungan Indonesia pada LPG impor semakin tinggi seiring waktu (Gambar 3). Pada awal 1990, Indonesia mengekspor lebih dari 94 persen dari LPG. Semenjak pertengahan 1995, ekspor LPG berangsur-angsur menurun, dan pada tahun 2008, Indonesia menjadi net importir LPG. Bahkan Gigih² (2014) mengatakan bahwa pada tahun 2013, impor LPG mencapai 59 persen dari total kebutuhan gas dalam negeri atau sekitar 3,3 juta ton (Munthe 2014). Meningkatnya impor mencerminkan bahwa masyarakat (terutama rumah tangga) semakin tergantung pada Elpiji sebagai sumber energi (jika di dalam rumah tangga sangat dibutuhkan sebagai sumber energi untuk memasak), diperkirakan permintaan Elpiji akan terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya jumlah

² Gigih Wahyu Hari, Vice President Domestic Gas PT. Pertamina.

penduduk. Dengan kata lain, impor LPG juga akan meningkat selama Indonesia belum mampu memenuhi permintaan dengan produksi LPG dalam negeri.



Sumber : Direktorat Minyak dan Gas, Kementerian ESDM dalam *LPG Price Adjustments in Indonesia: An Reform, 2014*

Gambar 3
Produksi, Ekspor dan Import LPG (Juta Ton)

Gigih (2014) juga mengatakan bahwa pasokan LPG yang didominasi oleh impor ini menyebabkan biaya produksi Elpiji juga tinggi, ditambah dengan bea masuk dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, membuat biaya produksi ikut tinggi. Kenaikan biaya produksi diungkapkan sebagai penyebab Pertamina mengalami kerugian sejak tahun 2009-2013 mencapai Rp 17 Trilyun (Lumbanraja 2014). Ada dua latar belakang yang menyebabkan harga Elpiji non-subsidi mengalami kenaikan (Energia 2014, p.2):

1. Secara hukum, berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pertamina adalah BUMN yang tidak boleh mengalami kerugian yang disengaja, karena menyebabkan kerugian adalah bentuk tindak pidana. Laporan BPK No.29/S/IX-XX.1/02/2013 tanggal 5 Februari 2013 juga merekomendasikan untuk menyesuaikan harga jual LPG 12Kg. Penyesuaian harga menurut UU Permen ESDM No.26 Tahun 2009 mengatakan bahwa pemberian harga produk non-subsidi adalah hak BUMN.
2. Dari sudut pandang bisnis korporasi, menaikkan harga LPG 12Kg diperlukan karena Pertamina terus menerus mengalami kerugian sejak 2008 diperkirakan sebesar Rp 22 triliun, dimana setiap tahunnya mengalami tren meningkat.

Kemudian karena kedua latar belakang tersebut, Pertamina dengan disetujui oleh pemerintah menyusun *roadmap* kenaikan harga Elpiji non-subsidi menuju harga keekonomian pada tahun 2016³.

³ Roadmap terdapat dalam lampiran.

Kenaikan harga Elpiji sudah disadari oleh banyak pihak akan menimbulkan permasalahan akibat disparitas harga dengan gas Elpiji subsidi 3Kg.

Berdasarkan hasil penelitian oleh kerjasama LPEM FEUI dengan Badan Kebijakan Fiskal (2012):

“Estimasi model konsumsi Elpiji 3Kg menunjukkan bahwa setiap terjadinya perbedaan harga Elpiji 12Kg dengan Elpiji 3Kg sebesar satu persen, maka akan mendorong kenaikan konsumsi Elpiji 3Kg sebesar 0,865%. Artinya substitusi dari Elpiji 12Kg ke Elpiji 3Kg disebabkan harga Elpiji 3Kg yang relatif lebih murah dibandingkan Elpiji 12Kg. Terjadinya substitusi ini tidak bisa dicegah karena di pasar Elpiji 3Kg dan 12Kg sangat mudah dijumpai dan berada pada pasar yang sama (tidak dapat dilakukan diskriminasi harga secara sempurna).”

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Sambodo (2014), bahwa gas Elpiji 3Kg (subsidi) dan non subsidi merupakan barang substitusi sempurna, sehingga ketika terjadi kenaikan harga Elpiji non-subsidi akan menyebabkan permintaan terhadap gas Elpiji 3Kg meningkat. Selain memicu adanya migrasi konsumen ke Elpiji 3Kg, perbedaan harga Elpiji subsidi dan non-subsidi juga memicu tindakan ilegal oleh oknum tertentu yang membeli gas Elpiji 3Kg dengan harga subsidi lalu di *oplos* dan dijual dalam kemasan 12Kg dengan harga non-subsidi.

Kesimpulan

Subsidi merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya. Termasuk subsidi Elpiji, selain dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi atas BBM, juga bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat pada bahan bakar yang hemat energi dan rendah polusi. Namun pada prakteknya, seperti di dalam teori, bahwa intervensi pemerintah (dalam hal ini subsidi elpiji) selalu mengganggu keseimbangan pasar yang sesungguhnya. Sehingga di lain pihak, memberikan dampak negatif.

Setelah disusun *roadmap* kenaikan harga Elpiji non-subsidi menuju harga keekonomiannya pada tahun 2016, maka dapat diprediksi semakin besar perbedaan harga terhadap dua barang yang memiliki fungsi sama. Pada kondisi ini, sifat substitusi barang menyebabkan tingginya permintaan atas gas Elpiji 3Kg ketika terjadi kenaikan harga pada Elpiji 12Kg, apalagi jika pemerintah tidak merencanakan sistem *monitoring* yang memadai atas konsumsi Elpiji subsidi. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa terdapat elastisitas positif terhadap konsumsi Elpiji 3Kg dan 12Kg, dimana ketika terjadi kenaikan satu persen pada harga Elpiji 12Kg akan meningkatkan konsumsi Elpiji 3Kg sebesar 0,865 persen. Dengan begitu, ada potensi *miss-targeting* subsidi Elpiji seperti juga yang terjadi pada subsidi BBM. Selama gas Elpiji masih dijual pada pasar yang sama dan tidak ada sistem yang baik untuk pengawasan penggunaan bagi konsumen yang tepat, maka tidak diragukan lagi

bahwa konsumen Elpiji yang seharusnya mengkonsumsi Elpiji non subsidi, akan berpindah ke Elpiji subsidi.

Selain adanya kekhawatiran akan migrasi konsumen Elpiji 12Kg ke Elpiji 3Kg yang artinya subsidi tidak sesuai target, perbedaan harga antara Elpiji subsidi dan non-subsidi juga memicu tindakan ilegal pengoplosan Elpiji subsidi yang dijual dengan harga non-subsidi. Kedua hal ini akan memberikan dampak negatif bagi pengeluaran pemerintah.

Saran

Seperti halnya subsidi BBM, subsidi Elpiji juga berpotensi untuk membebani pengeluaran negara. Pengawasan merupakan yang paling penting di dalam kebijakan subsidi agar tujuannya tepat sasaran. Program yang diciptakan Pertamina untuk mengantisipasi permasalahan ini adalah melakukan *monitoring* distribusi Elpiji 3Kg sampai pangkalan dengan aplikasi SIMOL3K (Sistem *Monitoring* Penyaluran Elpiji 3Kg). Di dalam program SIMOL3K, distribusi akan dilakukan secara tertutup, diharapkan SIMOL3K mampu mendeteksi secara dini tentang adanya penyalahgunaan penggunaan Elpiji akibat disparitas harga antara Elpiji non-subsidi dan subsidi.

Selain pengawasan, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memikirkan bagaimana cara agar setidaknya impor atas LPG dapat berkurang untuk dapat meminimalisir biaya produksi. Karena dalam jangka panjang, selama tidak ada sumber energi baru, diperkirakan permintaan Elpiji akan terus meningkat seiring dengan populasi yang meningkat. Yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi impor adalah memaksimalkan produksi dalam negeri dari berbagai sumur minyak. Selain itu, investasi besar dalam pengeboran sumur-sumur baru juga harus dilakukan demi kepentingan jangka panjang pemenuhan kebutuhan BBM dan LPG yang permintaannya terus meningkat. Setidaknya apabila pemerintah harus memberikan subsidi bagi masyarakat, pastikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan tepat sasaran, karena subsidi LPG merupakan subsidi konsumtif yang tidak memberikan efek *multiplier* besar.

Terakhir dan yang paling penting, tidak hanya masyarakat yang dikhawatirkan melakukan penyalahgunaan subsidi, namun juga sangat dibutuhkan transparansi dari berbagai pihak yang terlibat dalam jajaran otoritas migas Indonesia untuk melakukan segala program pemerintah sesuai dengan tujuannya.

Daftar Pustaka

Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara. Kajian Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji di Sumatera Utara. 2009.

CEIC Data

LPEM FEUI & Badan Kebijakan Fiskal, 2012. *Pengembangan Model Proyeksi Volume BBM Bersubsidi Berdasarkan Konsumen Pengguna dan Wilayah*.

Lumbanraja, 2014, 'Mengkaji Kenaikan Elpiji 12Kg: Pelajaran Kemandirian Masyarakat dan Stabilitas Ekonomi Jangka Panjang'. Diakses dari:
<<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/09/19/mengkaji-kenaikan-elpiji-12-kg-pelajaran-kemandirian-masyarakat-dan-stabilitas-ekonomi-jangka-panjang-688913.html>>.
[20 November 2014]

- Ministry of Energy and Mineral Resources, 2012. *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia*. Diakses dari :
 <<http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Handbook%20of%20Energy%20&%20Economic%20Statistics%20of%20Indonesia%20/Handbook%20of%20Energy%20&%20Economic%20Statistics%20ind%202012.pdf>>. [3 Desember 2014]
- Munthe, B.R, 2014, 'Konsumsi LPG Naik, Impor Bakal Meningkat'. Diakses dari :
 <<http://www.tempo.co/read/news/2014/04/22/090572214/Konsumsi-LPG-Naik-Impor-Bakal-Meningkat>>. [22 November 2014]
- PT. Pertamina, 2014. *Pertamina Sesuaikan Harga Elpiji 12Kg sebesar Rp 1.500 per-Kg*. Diakses dari:
 <<http://www.pertamina.com/news-room/siaran-pers/pertamina-sesuaikan-harga-elpiji-12kg-sebesar-rp1500-per-kg/>> . [15 November 2014].
- Pyndick, S.R & Rubinfeld, D.L (eds) 2013. *Microeconomics*, United States of America : Pearson.
- Rahardja, P & Manurung, M, 2006. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sambodo, M.T , 2014. *LPG Price Adjustments in Indonesia: An Unfinished Reform*. Institute of Southeast Asian Studies, ISSN 2335-667. Diakses dari:
 <http://www.iseas.edu.sg/documents/publication/ISEAS_Perspective_2014_30-LPG_Price_Adjustments_in_Indonesia_An_Unfinished_Reform.pdf>. [3 Desember 2014]
- Tim Energia, 2014, 'Harga Elpiji Non Subsidi 12Kg Naik Rp 1.000 nett per Kg', Energizing Asia (Energia) Weekly. <www.pertamina.com>. [21 November 2014]

Lampiran 1

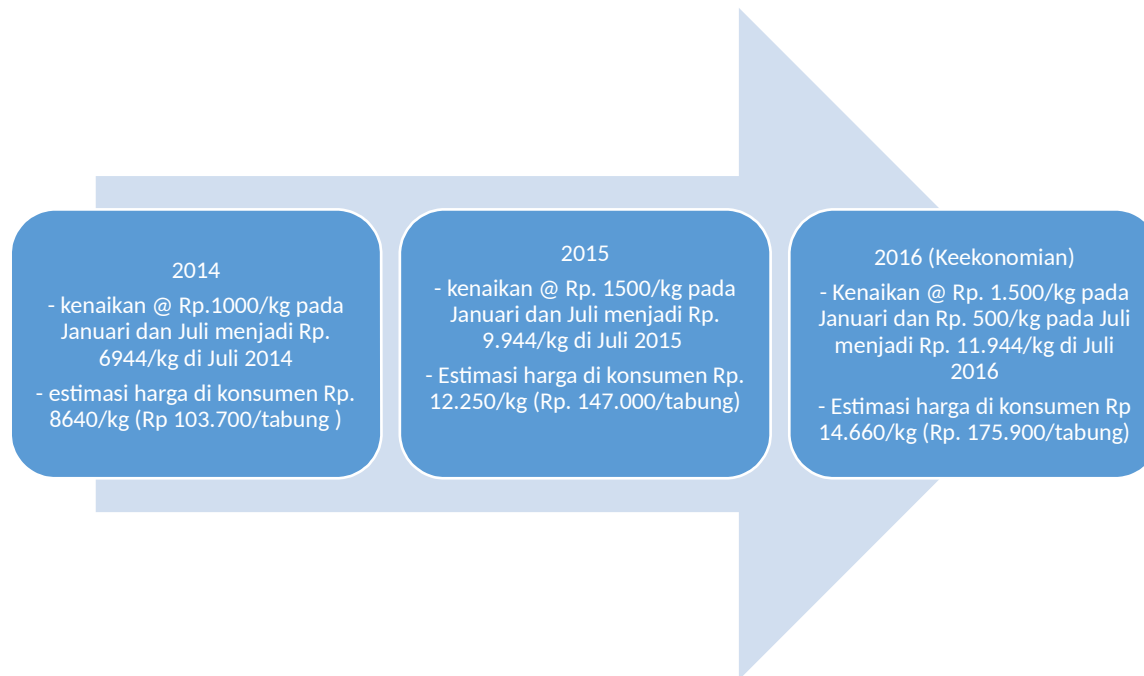
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2001-2013

Jenis Penerimaan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Dalam Negeri	99.84	99.15	113.24	133.89	164.05	211.29	234.53	325.27	281.35	329.57	400.34	442.52	475.64
Penerimaan Perpajakan	61.63	69.78	80.39	93.18	115.26	135.91	163.08	218.78	205.90	240.24	290.25	325.67	357.82
Pajak Dalam Negeri	58.45	66.27	76.70	88.95	110.20	131.52	156.12	206.71	199.70	230.64	272.27	309.18	342.05
PPH	31.41	33.84	38.20	39.70	58.30	69.36	79.19	108.78	105.49	118.59	143.19	154.47	168.21
Non Migas	23.74	28.03	31.90	32.07	46.63	55.02	64.58	83.19	88.87	99.04	118.91	126.75	138.73
Migas	7.67	5.80	6.30	7.62	11.67	14.34	14.61	25.58	16.62	19.55	24.28	27.72	29.48
PPN	18.59	21.64	25.60	34.07	33.64	40.87	51.32	69.63	64.13	76.59	92.27	112.13	127.78
PBB	1.74	2.07	2.91	3.91	5.39	6.93	7.88	8.42	8.06	9.49	9.93	9.62	8.40
BPHTB	0.47	0.53	0.71	0.97	1.14	1.06	1.98	1.85	2.15	2.67	0.00	0.00	0.00
Cukai	5.78	7.70	8.73	9.69	11.05	12.55	14.84	17.02	18.84	21.98	25.58	31.56	36.02
Pajak Lainnya	0.46	0.49	0.55	0.62	0.68	0.76	0.91	1.01	1.03	1.32	1.30	1.40	1.64
Pajak Perdagangan Internasional	3.18	3.51	3.69	4.23	5.06	4.39	6.95	12.07	6.20	9.60	17.98	16.49	15.76
Bea Masuk	3.00	3.44	3.62	4.13	4.96	4.03	5.55	7.56	6.01	6.65	8.39	9.44	10.50
Pajak Ekspor	0.18	0.08	0.08	0.10	0.11	0.36	1.41	4.51	0.19	2.96	9.58	7.05	5.26
Penerimaan Negara Bukan Pajak	38.22	29.37	32.84	40.70	48.79	75.38	71.45	106.49	75.45	89.33	110.10	116.85	117.83
Penerimaan Sumber Daya Alam	28.46	21.51	22.42	30.41	36.69	55.62	44.14	74.55	46.15	56.07	71.02	75.01	75.20
Minyak Bumi	19.58	15.84	14.27	20.94	24.19	41.57	31.09	56.14	29.91	37.14	46.93	48.07	44.95
Gas Alam	7.34	4.09	6.16	7.37	10.28	10.94	10.36	14.15	11.86	13.59	17.33	20.30	22.69
Sumber Daya Alam Lainnya	1.54	1.58	2.00	2.09	2.23	3.12	2.69	4.27	4.39	5.34	6.75	6.65	7.57
Bagian Laba BUMN	2.94	3.24	4.19	3.26	4.26	7.12	7.71	9.66	8.65	10.00	9.36	10.23	11.30
Surplus Bank Indonesia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Badan Layanan Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	1.24	2.78	3.52	6.68	7.21	8.19
PNBP lainnya	6.83	4.63	6.23	7.04	7.83	12.12	18.89	21.03	17.87	19.74	23.04	24.40	23.14
Hibah	0.16	0.00	0.16	0.09	0.43	0.61	0.56	0.77	0.55	1.00	1.75	1.92	2.27

Lampiran 2

Roadmap Usulan Penyesuaian Harga Elpiji 12kg

Sesuai surat Pertamina kepada Menteri BUMN dan ESDM No. R 004 tanggal 15 Januari 2014 perihal Roadmap Penyesuaian Harga Jual Elpiji 12kg Non Subsidi. Untuk mencapai perbaikan margin Elpiji 12kg, Pertamina mengusulkan kenaikan harga Elpiji 12kg secara berkala:



Sumber : <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/09/21/memahami-kenaikan-elpiji-12-kg-680156.html>